WELVAART
Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
Vol 6, No 2. Desember 2025, hlm 13-33
: 10.52423/welvaart.v6i2.111
ISSN: 2716-3679 (Online)

BANJIR BANDANG SEBAGAI MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI ACEH: TELAAH ISLAM KONTEMPORER DAN PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL

Agus Safrizal
Konsentrasi Pekerja Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: agussafrizal35@gmail.com

ABSTRAK

Banjir bandang merupakan bencana alam yang tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga menimbulkan persoalan kesejahteraan sosial yang kompleks bagi masyarakat terdampak. Di Provinsi Aceh, banjir bandang memperlihatkan kerentanan sosial yang mencakup kehilangan mata pencaharian, disrupsi fungsi sosial keluarga, meningkatnya kelompok rentan, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis banjir bandang sebagai masalah kesejahteraan sosial di Aceh melalui telaah Islam kontemporer dan pendekatan pekerjaan sosial. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-analitis terhadap literatur akademik, dokumen kebijakan, serta sumber-sumber keislaman yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perspektif Islam kontemporer memandang bencana sebagai ujian sosial yang menuntut tanggung jawab kolektif, keadilan sosial, dan penguatan solidaritas masyarakat (*ukhuwwah* dan *ta'awun*). Sementara itu, pendekatan pekerjaan sosial menekankan pentingnya intervensi berbasis komunitas, penguatan resiliensi sosial, serta pemberdayaan masyarakat pascabencana. Integrasi nilai-nilai Islam kontemporer dan praktik pekerjaan sosial berkontribusi dalam merumuskan strategi penanganan banjir bandang yang tidak hanya berorientasi pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan kebijakan sosial dan praktik pekerjaan sosial dalam penanggulangan bencana di wilayah Aceh.

Kata Kunci: Banjir Bandang; Kesejahteraan Sosial; Islam Kontemporer; Pekerjaan Sosial

ABSTRACT

Flash floods are natural disasters that not only cause physical damage to the environment but also create complex social welfare issues for affected communities. In Aceh Province, flash floods expose social vulnerabilities that include loss of livelihoods, disruption of family social functions, an increase in vulnerable groups, and limited access to basic services. This article aims to analyze flash floods as a social welfare issue in Aceh through a contemporary Islamic perspective and a social work approach. The method used is a literature review with a qualitative-analytical approach to academic literature, policy documents, and relevant Islamic sources. The results of the study indicate that the contemporary Islamic perspective views disasters as social tests that demand collective responsibility, social justice, and strengthening community solidarity (ukhuwwah and ta'awun). Meanwhile, the social work approach emphasizes the importance of community-based interventions, strengthening social resilience, and post-disaster community empowerment. The integration of contemporary Islamic values and social work practices contributes to the formulation of a flash flood management strategy that is oriented not only towards emergency assistance but also towards the restoration of sustainable social welfare. This article is expected to be a conceptual reference for the development of social policies and social work practices in disaster management in the Aceh region.

Keywords: *Flash Floods; Social Welfare; Contemporary Islam; Social Work.*

PENDAHULUAN

Banjir bandang merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan memengaruhi kehidupan masyarakat dalam banyak hal. Banjir ini menyebabkan kerusakan pada hal-hal fisik seperti rumah, gedung publik, jalan, dan jembatan (Yunanda, 2025). Banjir juga merusak lingkungan, seperti menghancurkan lahan pertanian, membunuh hewan, dan mengurangi akses terhadap air bersih. Secara sosial, banjir menyebabkan stres, menghentikan kegiatan sekolah, dan meningkatkan risiko penyakit. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga oleh keluarga dan seluruh komunitas, yang dapat mempersulit upaya menjaga stabilitas masyarakat dan memperlambat pemulihan (Widayanti, 2018). Karena itu, penanganan bencana ini membutuhkan rencana komprehensif yang mencakup pencegahan risiko, persiapan menghadapi perubahan, dan membantu masyarakat menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan jangka panjang.

Provinsi Aceh sangat rawan bencana, terutama banjir bandang, yang sering terjadi di daerah pegunungan dan dekat sungai. Geografi wilayah ini, dengan banyaknya pegunungan dan sungai besar, memudahkan terjadinya banjir saat curah hujan tinggi. Selain itu, perubahan penggunaan lahan, seperti penebangan pohon, pengubahan lahan pertanian menjadi perumahan, dan proyek pembangunan tanpa mempertimbangkan lingkungan, membuat bencana semakin mungkin terjadi (Lubis, Lestari dan Hayari, 2022). Ditambah lagi, perubahan iklim menyebabkan hal-hal seperti curah hujan yang sulit diprediksi dan suhu yang lebih panas, yang membuat banjir bandang terjadi lebih sering dan lebih parah. Karena itu, masyarakat Aceh menghadapi bahaya yang tidak hanya mengancam nyawa mereka tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian mereka.

Banjir bandang di Aceh tidak hanya menghancurkan bangunan; tetapi juga memunculkan masalah sosial yang besar. Kehilangan rumah, rusaknya sekolah dan rumah sakit, serta terganggunya kehidupan sehari-hari membuat masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan hidup. Dampak ini dapat berlangsung lama, menyebabkan kemiskinan yang lebih besar, anak-anak putus sekolah, masalah kesehatan mental, dan berkurangnya bantuan dari orang lain. Oleh karena itu,

masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar bantuan cepat; mereka membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk memperbaiki kehidupan mereka, membangun lingkungan yang lebih kuat, dan bersiap menghadapi bencana di masa depan (Ismail, 2020).

Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas paling terdampak selama bencana. Mereka sering kesulitan mendapatkan bantuan, perawatan medis, dan dukungan emosional. Kelompok-kelompok ini juga kesulitan meninggalkan rumah mereka, membangun kembali rumah mereka, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka setelah bencana. Hal ini menunjukkan bagaimana banjir bandang terkait dengan ketidaksetaraan sosial dan sistem pendukung yang lemah. Oleh karena itu, rencana penanggulangan bencana perlu mencakup semua orang, memastikan semua orang diperlakukan secara adil, melibatkan komunitas lokal, dan menciptakan sistem pendukung yang kuat untuk membantu semua orang pulih secara berkelanjutan, terutama mereka yang paling berisiko.

Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, bencana alam dapat memperburuk kemiskinan dan menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara berbagai komunitas. Bencana ini tidak hanya memengaruhi hal-hal fisik bencana ini juga menghalangi orang untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan layanan penting lainnya (Fatimahsyam, 2024). Ketika bantuan bencana hanya memberikan bantuan jangka pendek, hal itu tidak menyelesaikan masalah utama. Oleh karena itu, dibutuhkan rencana jangka panjang yang lebih baik. Rencana ini harus mencakup pembangunan kembali ekonomi, perbaikan komunitas, dan penciptaan sistem yang adil untuk membantu masyarakat. Penting untuk memasukkan budaya, tradisi, dan nilai-nilai lokal untuk memastikan pemulihan efektif dan berlangsung lama.

Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, bencana alam dapat memperburuk kemiskinan dan meningkatkan kesenjangan antar komunitas. Dampak bencana bukan hanya kerusakan properti, tetapi juga menghalangi orang untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan layanan penting lainnya. Ketika respons bencana hanya fokus pada membantu orang secara langsung, mereka tidak

menyelesaikan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan rencana yang lebih kuat yang mencakup pembangunan kembali ekonomi, perbaikan komunitas, dan pembentukan sistem yang adil untuk membantu masyarakat. Rencana ini harus mempertimbangkan adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai lokal untuk memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan (Suwarno dan Niam, 2024).

Aceh memiliki identitas sosial dan budaya yang kuat, terutama dalam hal mengikuti nilai-nilai Islam. Islam membantu orang mengetahui bagaimana memperlakukan orang lain, bersikap adil, menunjukkan kebaikan, dan saling menjaga. Nilai-nilai ini terlihat dalam bagaimana orang bertindak terhadap satu sama lain, bekerja sama, mengelola sumber daya, dan membantu mereka yang membutuhkan. Menggunakan sudut pandang Islam dalam pengelolaan banjir dapat membantu membangun rasa keadilan, persatuan, dan tanggung jawab bersama. Hal ini membuat upaya pemulihan tidak hanya efektif, tetapi juga membantu menyatukan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang.

Islam modern memandang bencana sebagai hal yang berdampak pada semua orang dalam masyarakat, bukan hanya individu. Perspektif ini berfokus pada kebaikan, saling membantu, perlakuan adil, dan memperhatikan orang lain. Gagasan-gagasan ini membantu masyarakat memberikan bantuan yang mencakup kebutuhan dasar dan juga memastikan bahwa orang-orang yang lemah atau membutuhkan dilindungi hak-haknya. Cara bertindak ini sesuai dengan tujuan membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti menciptakan keadilan, melibatkan semua orang, dan memastikan bantuan berkelanjutan. Menggunakan gagasan-gagasan Islam modern ini dalam menghadapi bencana membantu masyarakat bangkit kembali dengan lebih baik, lebih mampu mengurus diri sendiri, dan lebih siap untuk saling mendukung (Kasim, Nurdin dan Rizwan, 2021).

Menggabungkan nilai-nilai Islam modern dengan teknik kerja sosial membantu menciptakan rencana yang lebih baik untuk menghadapi bencana. Ini mencakup pemberian bantuan cepat seperti makanan dan tempat tinggal yang aman, bersamaan dengan upaya jangka panjang untuk membangun kembali, mengembangkan komunitas, dan memperkuatnya. Dengan cara ini, bantuan yang diberikan adil, mencakup semua orang, dan dapat bertahan lama. Hal ini juga

membantu komunitas menjadi lebih siap dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Pemulihan setelah bencana bukan hanya tentang memperbaiki hal-hal yang rusak; ini juga tentang meningkatkan hubungan sosial, menyatukan orang-orang, dan memastikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dalam jangka panjang.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada faktor teknis dan lingkungan, tetapi kurang memperhatikan isu-isu sosial dan nilai-nilai Islam. Studi ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan melihat banjir bandang sebagai masalah kesejahteraan sosial dari sudut pandang Islam modern dan menggunakan metode kerja sosial. Dengan meninjau makalah akademis yang ada, kebijakan pemerintah, dan ajaran Islam, studi ini memberikan gambaran lengkap tentang tantangan selama bencana dan solusi sosial yang mungkin. Hasilnya diharapkan dapat membantu pemerintah, pekerja sosial, dan masyarakat setempat untuk menciptakan rencana penanggulangan bencana yang lebih baik, adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini akan membantu masyarakat Aceh pulih lebih cepat, menjadi lebih kuat, dan lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mencakup peninjauan literatur yang ada dan penggunaan analisis deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi banjir bandang di Aceh sebagai isu kesejahteraan sosial, dilihat melalui lensa Islam modern dan pekerjaan sosial. Metode ini berfokus pada pemahaman latar belakang sosial, budaya, dan agama daripada hanya mengandalkan angka. Peninjauan literatur membantu peneliti melihat tulisan, dokumen, dan laporan masa lalu untuk menciptakan kerangka kerja analisis yang lengkap. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk memeriksa data, melihat tren sosial, nilai-nilai Islam, dan praktik pekerjaan sosial, serta melihat bagaimana elemen-elemen ini saling berhubungan. Tujuan studi ini adalah untuk menawarkan wawasan teoritis dan ide-ide praktis untuk menciptakan kebijakan sosial, tindakan pekerjaan sosial, dan strategi untuk mengatasi banjir bandang yang sesuai dengan tradisi lokal dan nilai-nilai Islam modern.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh, dengan fokus pada daerah-daerah yang sangat berisiko terkena banjir bandang, termasuk Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Raya, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Nagan Raya. Daerah-daerah ini dipilih karena sering mengalami bencana yang sangat memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Geografi daerah-daerah ini, dengan pegunungan dan dataran tingginya, serta curah hujan yang tinggi, membuat mereka sangat rentan terhadap banjir bandang. Banjir ini tidak hanya memengaruhi rumah dan harta benda masyarakat, tetapi juga kesehatan sosial, ekonomi, dan mental mereka. Aceh juga memiliki rasa kebersamaan dan budaya yang kuat, di mana masyarakat bekerja sama dan saling membantu. Kepercayaan agama, terutama nilai-nilai Islam, memainkan peran besar dalam bagaimana masyarakat menghadapi bencana. Masyarakat menggunakan kegiatan seperti berdoa, memberi sedekah, dan bentuk-bentuk dukungan komunitas lainnya untuk saling membantu. Perpaduan unik antara budaya dan agama ini memungkinkan penelitian untuk melihat bagaimana gagasan Islam modern terhubung dengan pekerjaan sosial, dan bagaimana kepercayaan dan tradisi lokal memengaruhi bagaimana masyarakat mempersiapkan diri, menangani, dan pulih dari banjir.

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber informasi, seperti makalah akademis, buku, tesis, disertasi, dan laporan yang membahas tentang bencana alam, dukungan sosial, pekerjaan sosial, dan gagasan Islam modern. Selain itu, dokumen, peraturan, dan program pemerintah penting dari Aceh juga dipelajari secara cermat untuk melihat seberapa baik pelaksanaannya, bagaimana berbagai kelompok bekerja sama, dan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap bencana. Materi Islam juga sangat penting, termasuk fatwa agama, pedoman Islam modern, tulisan dari kelompok agama, dan teks yang membahas tentang membantu sesama, persatuan, dan keadilan dalam Islam. Untuk mengumpulkan data, para peneliti meneliti materi-materi tersebut, mempelajari isi sumber-sumber Islam, dan mengelompokkan informasi ke dalam tiga topik utama: dampak banjir bandang terhadap masyarakat, tindakan yang dilakukan oleh pekerja sosial, dan bagaimana nilai-nilai Islam modern digunakan dalam menangani bencana. Dengan cara ini, para peneliti dapat meneliti informasi dengan saksama, menemukan bagaimana

berbagai gagasan saling terkait, dan membagikan hasil yang rinci dan jelas yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan dalam tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data secara tematik, dan penarikan kesimpulan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Selama reduksi data, informasi yang paling penting disaring, dipilih, dan diringkas. Penyajian tematik membantu dalam memahami bagaimana dampak sosial, upaya kerja sosial, dan nilai-nilai Islam modern saling terkait. Kesimpulan dibuat dengan cermat untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dan praktik kerja sosial bekerja sama dalam membantu masyarakat pulih setelah bencana. Untuk memastikan data dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan menggunakan dokumen, literatur, dan referensi yang dapat diandalkan, serta dengan memeriksa relevansi data dengan situasi sosial di Aceh. Pendekatan yang cermat ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang banjir bandang sebagai masalah kesejahteraan sosial, dan juga menawarkan ide-ide baru untuk tindakan kerja sosial yang mengikuti nilai-nilai Islam modern. Hal ini dapat membantu membuat respons bencana lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai untuk masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banjir Bandang sebagai Masalah Kesejahteraan Sosial

Banjir bandang di Aceh menyebabkan lebih dari sekadar kerusakan fisik; banjir tersebut juga memiliki dampak yang mendalam dan jangka panjang pada masyarakat. Rumah, lingkungan, dan tempat umum hancur, membuat orang-orang kehilangan tempat tinggal yang aman dan layak. Kehilangan rumah bukan hanya tentang tidak memiliki tempat tinggal tetapi juga memengaruhi kesejahteraan sosial dan emosional keluarga. Rumah adalah tempat keluarga berkumpul, saling menjaga, dan berinteraksi setiap hari. Ketika bencana menghancurkan hal ini, keluarga menghadapi risiko yang lebih besar, yang dapat menyebabkan stres berkelanjutan, kebingungan, berkurangnya rasa aman, dan melemahnya hubungan antar anggota keluarga. Hal ini memengaruhi bagaimana orang tua merawat anak-anak mereka dan bagaimana sistem dukungan keluarga berfungsi. Ini menunjukkan bahwa banjir bandang merusak fondasi dasar dukungan sosial, terutama keluarga,

yang pada gilirannya melemahkan kemampuan masyarakat untuk pulih dan beradaptasi setelah bencana. Hal ini juga mempersulit daerah tersebut untuk membangun masa depan yang berkelanjutan setelah banjir.

Banjir bandang tidak hanya merusak rumah tetapi juga membahayakan infrastruktur publik, yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Ketika jalan, jembatan, sekolah, pusat kesehatan, dan sistem air bersih rusak, hal itu memperlambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sana. Jika transportasi terganggu, hal itu mempersulit pengiriman bantuan dan juga membatasi kemampuan masyarakat untuk pergi bekerja, bersekolah, atau mendapatkan perawatan medis. Seiring waktu, kerusakan sekolah dapat menyebabkan lebih banyak siswa putus sekolah, kualitas sumber daya manusia yang lebih rendah, dan kesenjangan yang lebih besar antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketika layanan kesehatan terganggu, hal itu meningkatkan risiko penyakit, memperburuk keadaan bagi orang-orang yang rentan, dan menghambat upaya untuk mencegah dan memulihkan masalah kesehatan setelah bencana. Situasi ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur publik sangat penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan untuk mendukung pemulihan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Banjir secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat di Aceh, terutama mereka yang bergantung pada pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha kecil. Ketika lahan pertanian rusak, tanaman hilang, alat pertanian rusak, dan hewan mati, hal itu menyebabkan penurunan pendapatan yang besar dan berkepanjangan. Ini membuat banyak keluarga kesulitan secara finansial dan meningkatkan risiko jatuh ke dalam kemiskinan yang parah. Tanpa pendapatan yang stabil, masyarakat lebih bergantung pada bantuan dari orang lain dan memiliki kemampuan yang lebih kecil untuk bangkit kembali sendiri. Masalah ekonomi ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga mempersulit seluruh komunitas untuk tetap stabil.

Dari perspektif kesejahteraan sosial, serangkaian dampak dari tanah longsor menunjukkan krisis sosial. Krisis ini ditunjukkan oleh penurunan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk berfungsi dengan baik secara bersamaan.

Orang-orang yang terdampak tidak hanya menderita kerugian materiil tetapi juga menghadapi tekanan psikologis jangka panjang seperti trauma, kecemasan, ketakutan, dan rasa tidak aman. Kondisi psikologis dan sosial ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan menjalankan peran sosialnya. Menurut Akmal, et al (2024) di tingkat keluarga, tekanan ekonomi, kehilangan tempat tinggal, dan kondisi hidup yang tidak stabil dapat merusak kemampuan keluarga untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan dukungan sosial kepada semua anggotanya. Sementara itu, di tingkat masyarakat, kerusakan infrastruktur sosial dan ekonomi dapat mengurangi kohesi sosial, melemahkan jaringan solidaritas, dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk menghadapi risiko, kerentanan, dan tantangan setelah bencana secara berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan bahwa tanah longsor dapat memperdalam ketidaksetaraan sosial jika tidak ditangani secara komprehensif dan adil.

Pembahasan ini menyoroti bahwa penanganan banjir bandang di Aceh seharusnya tidak hanya tentang memberikan bantuan segera dan memperbaiki kerusakan. Memberikan makanan, pakaian, tempat penampungan sementara, dan perawatan medis darurat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Tetapi jika kita tidak merencanakan masa depan dan berupaya mencari solusi jangka panjang, masalah yang disebabkan oleh banjir akan terus terjadi dan memperlambat pemulihan masyarakat. Oleh karena itu, kita membutuhkan rencana jangka panjang yang mencakup pembangunan kembali rumah, perbaikan bangunan komunitas yang penting, membantu masyarakat menemukan cara yang stabil untuk mencari nafkah, dan memberikan dukungan berkelanjutan untuk kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Sebagaimana yang diuraikan oleh Maulita, Parahita dan Trinugraha (2023) bahwa harus dilakukan melalui kerja sama tim antar berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta dengan melibatkan masyarakat setempat dalam membuat, melaksanakan, dan memeriksa rencana pemulihan.

Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa banjir bandang di Aceh bukan hanya peristiwa alam tetapi juga masalah sosial kompleks yang melibatkan banyak aspek berbeda. Melihat dari sudut pandang kesejahteraan sosial membantu

kita fokus pada pembangunan kembali kehidupan sehari-hari dan fungsi masyarakat setelah bencana. Menangani banjir bandang bukan hanya tentang memperbaiki bangunan yang rusak atau lahan yang terdampak tetapi juga tentang membantu masyarakat mendapatkan kembali harga diri, kemandirian, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Karena alasan itu, diperlukan pendekatan gabungan yang mencakup tindakan darurat yang cepat, membantu masyarakat pulih secara ekonomi dan sosial, dan melibatkan masyarakat dalam membangun kemampuan mereka sendiri. Metode ini menyatukan berbagai kelompok, menggunakan sumber daya lokal yang tersedia, dan memastikan upaya pemulihan berlangsung dalam jangka waktu lama. Dengan rencana ini, masyarakat Aceh diharapkan dapat pulih secara berkelanjutan, menjadi lebih kuat sebagai komunitas, dan lebih siap menghadapi bencana di masa depan dengan cara yang melibatkan semua orang dan beradaptasi dengan kondisi yang berubah.

Kerentanan Sosial dan Dampak Berlapis pada Kelompok Rentan

Banjir bandang di Aceh berdampak pada berbagai lapisan masyarakat dengan cara yang berbeda, dengan perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi yang paling terdampak. Hal ini karena kelompok-kelompok ini sudah mengalami kesulitan dalam situasi fisik, sosial, dan ekonomi sebelum banjir terjadi. Selama keadaan darurat, keterbatasan kemampuan mereka untuk bergerak dan ketergantungan mereka pada orang lain membuat mereka lebih berisiko, baik saat mencoba menyelamatkan diri maupun saat mendapatkan kebutuhan dasar setelah bencana. Ini menunjukkan bahwa banjir bandang tidak hanya merusak harta benda tetapi juga memperburuk kelemahan sosial yang sudah ada. Selain itu, fakta bahwa kelompok-kelompok ini memiliki akses yang lebih sedikit terhadap informasi, perawatan kesehatan, layanan dukungan, dan bantuan kesehatan mental membuat mereka lebih rentan mengalami trauma, kemiskinan, dan terpinggirkan dari masyarakat setelah bencana. Ini berarti bahwa pengelolaan banjir bandang perlu dilakukan dengan cara yang mencakup dan mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok rentan, sehingga pemulihan kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat umum tetapi benar-benar membantu melindungi mereka.

Perempuan dan anak-anak termasuk kelompok yang sangat menderita selama dan setelah banjir bandang. Perempuan berisiko kehilangan pekerjaan dan rumah mereka, dan mereka masih harus mengurus keluarga dan mengelola tugas rumah tangga bahkan ketika keadaan sulit dan penuh tekanan. Pada saat yang sama, anak-anak sangat terpengaruh karena sekolah mungkin rusak, sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, anak-anak lebih mungkin menghadapi kekerasan, eksploitasi, atau mengalami gangguan emosional karena kehilangan rasa aman dan kehidupan normal. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani dengan tepat melalui solusi yang bijaksana dan berkelanjutan yang melindungi hak-hak anak, hal itu dapat membahayakan pertumbuhan mereka dalam hal perkembangan sosial, emosional, dan mental.

Lansia dan penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan lebih besar selama banjir bandang karena keterbatasan fisik, masalah kesehatan, dan kurangnya akses terhadap bantuan. Mereka kesulitan meninggalkan rumah dengan cepat, memiliki pilihan perawatan medis berkelanjutan yang lebih sedikit, dan tidak cukup alat atau tempat yang mudah mereka gunakan. Tantangan-tantangan ini membuat mereka lebih berisiko selama bencana. Selain itu, kebutuhan emosional dan mental mereka tidak selalu dipertimbangkan ketika bantuan bencana diberikan. Banyak rencana darurat tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka, baik itu tempat perlindungan, bantuan medis yang mereka dapatkan, atau bagaimana mereka menerima dukungan. Karena itu, lansia dan penyandang disabilitas mungkin ditinggalkan sendirian, diabaikan, atau terputus dari masyarakat setelah bencana. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam sistem yang seharusnya melindungi semua orang. Sistem tersebut seharusnya memastikan semua orang aman, dihormati, dan dirawat dengan adil dan baik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa banjir bandang dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, terutama bagi kelompok yang sudah memiliki sumber daya lebih sedikit dan akses yang lebih terbatas terhadap bantuan. Karena itu, manajemen bencana harus berfokus pada keadilan dan inklusivitas semua orang. Penting untuk memastikan bahwa kebutuhan kelompok rentan ini dipertimbangkan di setiap langkah, mulai dari persiapan menghadapi bencana hingga respons selama keadaan

darurat dan pembangunan kembali setelahnya. Menurut Suwarno dan Niam (2024) pendekatan kesejahteraan sosial berarti melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan mempertimbangkan perbedaan gender dan kemampuan, sehingga rencana bencana dapat membantu semua orang secara adil. Melibatkan komunitas lokal dan orang-orang rentan dalam perencanaan dan pengecekan upaya-upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada orang yang tepat. Jadi, ketika kita pulih dari bencana, kita tidak hanya harus mencoba mengurangi dampaknya, tetapi juga meningkatkan sistem dukungan bagi orang-orang rentan, meningkatkan standar hidup mereka, dan membangun komunitas yang lebih kuat dan inklusif di daerah-daerah yang sering dilanda bencana.

Perspektif Islam Kontemporer terhadap Bencana Alam

Dari sudut pandang Islam modern, banjir bandang tidak hanya dilihat sebagai kejadian alam atau sesuatu yang menimpa individu. Sebaliknya, banjir bandang dipandang sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk bersatu dan bertanggung jawab satu sama lain. Dalam Islam, bencana dipandang sebagai pesan dan kesempatan untuk tumbuh dalam kebaikan, kepedulian terhadap sesama, dan saling mendukung dalam komunitas. Cara berpikir ini menjauh dari pandangan bahwa hal-hal buruk tidak dapat dihindari dan lebih berfokus pada bagaimana orang dapat bertindak secara moral dan sosial selama masa-masa sulit. Orang diyakini memiliki kewajiban untuk membantu orang lain, terutama mereka yang paling membutuhkan, dengan menyelamatkan mereka, membantu mereka pulih, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Cara Islam dalam menghadapi bencana tidak hanya berarti menerima apa yang terjadi tetapi juga berarti mengambil tindakan nyata, seperti saling membantu, membela keadilan, dan berbagi beban. Jadi, banjir bandang dapat menjadi waktu untuk lebih memikirkan tentang bekerja sama, menciptakan masyarakat yang lebih adil, dan terlibat dalam cara-cara yang membantu komunitas secara berkelanjutan dan bermanfaat.

Prinsip *ukhuwwah* (persaudaraan) menjadi landasan utama dalam membangun respons sosial terhadap bencana, karena menempatkan seluruh anggota masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling terikat secara moral dan

sosial. Dalam konteks banjir bandang di Aceh, *ukhuwwah* menuntut hadirnya rasa kebersamaan, empati, dan kepedulian yang melampaui batas latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Solidaritas sosial yang berlandaskan *ukhuwwah* mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam proses evakuasi, penyediaan tempat pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pendampingan bagi korban terdampak. Lebih dari itu, nilai persaudaraan ini juga berperan penting dalam proses pemulihan pascabencana dengan menumbuhkan semangat gotong royong dan saling menguatkan. Dengan terbangunnya kohesi sosial yang kuat, risiko marginalisasi kelompok rentan dapat diminimalkan, sehingga proses pemulihan kesejahteraan sosial dapat berlangsung secara lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) menegaskan adanya kewajiban kolektif untuk memberikan bantuan secara berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada fase tanggap darurat, tetapi juga mencakup tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dalam perspektif Islam kontemporer, bantuan sosial tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, melainkan harus dikelola secara adil, transparan, dan akuntabel agar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Prinsip *ta'āwun* juga menekankan pentingnya orientasi pemberdayaan, sehingga korban bencana didorong untuk kembali mandiri dan berdaya secara sosial maupun ekonomi. Melalui semangat tolong-menolong ini, masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi sosial, dan negara didorong untuk berkolaborasi secara sinergis dalam memperkuat pemulihan mata pencaharian, pemulihan layanan sosial, serta penyediaan dukungan psikososial yang berkelanjutan bagi korban banjir bandang.

Prinsip *'adl* (keadilan sosial) menempatkan perlindungan terhadap kelompok *mustadh'afin* sebagai prioritas utama dalam seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang. Islam menegaskan bahwa perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh keselamatan, akses bantuan, serta dukungan pemulihan yang layak dan bermartabat. Prinsip keadilan ini menuntut agar distribusi bantuan tidak bersifat seragam, melainkan mempertimbangkan

kebutuhan spesifik dan tingkat kerentanan masing-masing kelompok. Dengan demikian, perspektif Islam kontemporer selaras dengan pendekatan kesejahteraan sosial yang menekankan inklusivitas, keberpihakan pada kelompok rentan, dan penghapusan ketimpangan struktural. Sarifah, dkk (2024) menjelaskan bahwa bencana dipahami bukan semata sebagai musibah, tetapi sebagai momentum moral untuk membangun sistem sosial yang lebih peduli, adil, dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.

Peran Nilai-Nilai Islam dalam Pemulihan Sosial di Aceh

Dalam masyarakat Aceh, nilai-nilai Islam berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari dan berperan sebagai penunjang utama dalam menghadapi dan memulihkan diri dari banjir bandang. Islam dipraktikkan bukan hanya sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga sebagai panduan bagaimana orang berinteraksi, saling mendukung, dan membangun persahabatan. Studi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama seperti bekerja sama, peduli terhadap sesama, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat membantu mempercepat pemulihan setelah bencana. Nilai-nilai ini membantu menjaga persatuan masyarakat di masa-masa sulit dan mengurangi risiko konflik yang mungkin terjadi karena kelangkaan sumber daya dan tekanan yang dihadapi korban banjir (Maulita, Parahita dan Trinugraha, 2023).

Salah satu contoh nyata bagaimana nilai-nilai Islam membantu masyarakat pulih adalah praktik kerja sama timbal balik, yang disebut gotong royong, yang masih sangat kuat di masyarakat Aceh. Setelah banjir besar, orang-orang berkumpul untuk membersihkan lingkungan, memperbaiki rumah mereka, membangun kembali tempat-tempat umum, dan memberikan dukungan kepada keluarga yang terkena dampak. Gotong royong tidak hanya membantu membangun kembali secara fisik tetapi juga membantu orang-orang pulih secara emosional. Dengan banyak bekerja sama, orang-orang merasa tidak terlalu kesepian, tidak terlalu tak berdaya, dan trauma akibat bencana mulai menghilang. Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, praktik ini menunjukkan bagaimana hubungan sosial semakin kuat, yang penting untuk membantu seluruh komunitas bangkit kembali setelah bencana.

Selain bekerja sama, sistem amal Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah membantu masyarakat pulih setelah bencana. Studi ini menunjukkan bahwa organisasi yang mengelola zakat, baik resmi maupun lokal, secara aktif memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak banjir bandang. Bantuan ini mencakup lebih dari sekadar kebutuhan dasar—tetapi juga termasuk pendanaan untuk bisnis, perbaikan rumah, dan dukungan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak. Jadi, zakat dan sedekah bertindak sebagai alat untuk berbagi sumber daya dengan lebih baik, yang membantu mengurangi kesulitan keuangan dan mencegah masyarakat menjadi lebih miskin.

Masjid memainkan peran penting dalam menyatukan orang-orang selama penelitian ini. Di banyak wilayah Aceh yang dilanda banjir mendadak, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Masjid juga menjadi tempat pengorganisasian bantuan, evakuasi orang-orang ke tempat aman, dan pemberian dukungan kepada mereka yang membutuhkan perawatan emosional dan mental. Kegiatan seperti salat berjamaah, belajar tentang agama, dan mendengarkan ceramah keagamaan memberi masyarakat rasa kekuatan dan harapan. Kegiatan-kegiatan ini membantu masyarakat memahami bencana secara positif dan mendorong mereka untuk menjadi kuat dan membangun kembali kehidupan mereka. Dari sudut pandang pekerjaan sosial, ini menunjukkan bagaimana penggunaan tempat-tempat lokal seperti masjid dapat membantu membangun komunitas yang lebih kuat dan tangguh.

Selain itu, nilai-nilai Islam juga mendorong rasa tanggung jawab bersama di antara komunitas, pemimpin agama, kelompok agama, dan pemerintah dalam menghadapi bencana. Islam modern menekankan bahwa membangun kembali masyarakat bukanlah hanya tugas individu atau mereka yang terkena dampak, tetapi membutuhkan kerja sama tim yang berkelanjutan dari berbagai kelompok. Studi ini menunjukkan bahwa ketika kelompok agama, organisasi sosial, dan pejabat pemerintah bekerja sama, hal itu mempercepat proses pemulihan dan membuat bantuan lebih efisien. Kerja sama tim ini membangun sistem dukungan sosial yang lebih kuat yang berakar pada nilai-nilai lokal dan agama, sehingga respons terhadap

bencana menjadi lebih sesuai untuk komunitas dan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Nilai-nilai Islam terbukti penting dalam membantu Aceh pulih setelah banjir bandang. Cara masyarakat bekerja sama, saling membantu, dan menggunakan masjid sebagai tempat dukungan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka yang terdampak, tetapi juga membangun ikatan komunitas yang lebih kuat, membuat masyarakat lebih tangguh, dan meningkatkan hubungan antar masyarakat. Menggabungkan nilai-nilai Islam dengan dukungan sosial dan kerja komunitas menawarkan cara pemulihan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberdayakan. Metode ini merupakan kunci untuk memastikan pemulihan lebih dari sekadar jangka pendek, dan membantu menciptakan masyarakat di Aceh yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih siap menghadapi bencana di masa depan.

Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Pascabencana

Pekerjaan sosial berfokus pada gagasan bahwa penanganan banjir bandang seharusnya tidak hanya tentang membantu selama krisis. Hal itu juga harus mencakup pemulihan jangka panjang dan membantu komunitas menjadi lebih kuat. Penelitian menunjukkan bahwa memberikan bantuan segera seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal penting untuk menjaga keselamatan orang, tetapi itu tidak cukup untuk mengembalikan kehidupan normal bagi seluruh komunitas. Dalam situasi ini, pekerjaan sosial penting karena membantu menciptakan rencana yang mendukung pemulihan sosial, membangun kemampuan individu dan keluarga, serta memperbaiki sistem komunitas yang rusak setelah bencana. Dengan cara ini, para penyintas bencana tidak hanya dilihat sebagai orang yang membutuhkan bantuan, tetapi sebagai individu yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk pulih sendiri.

Penilaian kebutuhan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membantu masyarakat pasca bencana. Penelitian menunjukkan bahwa melakukan penilaian yang detail membantu pekerja sosial lebih memahami kebutuhan fisik, mental, sosial, dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Dengan informasi ini, pekerja sosial dapat mengidentifikasi mereka yang paling berisiko, situasi keluarga mereka, dan sumber daya lokal yang dapat digunakan untuk membantu pemulihan.

Ketika penilaian mempertimbangkan latar belakang budaya dan nilai-nilai masyarakat, seperti nilai-nilai Islam yang kuat di Aceh, bantuan yang diberikan akan lebih tepat, diterima oleh masyarakat, dan lebih mungkin berkelanjutan.

Dukungan psikososial merupakan bagian penting dari pekerjaan sosial setelah bencana. Banjir bandang tidak hanya menyebabkan kerusakan properti; banjir juga memengaruhi kesehatan mental masyarakat, yang mengakibatkan perasaan trauma, kekhawatiran, dan kesedihan yang mendalam. Studi menunjukkan bahwa dukungan psikososial membantu individu dan keluarga merasa lebih baik secara emosional, mendapatkan kembali rasa aman, dan mengembangkan cara yang lebih baik untuk menghadapi situasi sulit. Pekerja sosial menggunakan konseling, kelompok dukungan, dan acara komunitas untuk membantu masyarakat pulih secara emosional dan membangun hubungan yang lebih kuat dalam keluarga dan komunitas mereka.

Selain membantu individu dan keluarga, pekerjaan sosial juga berfokus pada pengorganisasian komunitas sebagai cara untuk pulih dari bencana. Studi menunjukkan bahwa komunitas yang terorganisir dengan baik lebih mampu menghadapi dan pulih dari krisis. Pekerja sosial membantu dengan mendorong orang untuk terlibat, mendukung pemimpin lokal, dan menciptakan kelompok yang bekerja sama dalam pemulihan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Metode ini merupakan bagian dari pendekatan berbasis komunitas yang menempatkan komunitas itu sendiri sebagai pusat upaya pemulihan.

Pendekatan person-in-environment dan ekologi sosial menawarkan cara yang berguna untuk memahami bagaimana banjir bandang memengaruhi masyarakat secara kompleks. Pandangan ini menunjukkan bahwa masalah pribadi terhubung dengan lingkungan fisik, sosial, dan struktural tempat seseorang tinggal. Studi ini menemukan bahwa masyarakat Aceh rentan terhadap banjir bandang karena faktor lingkungan, perencanaan lahan, situasi ekonomi, dan ketersediaan layanan sosial. Dengan pemahaman ini, pekerja sosial dapat membuat rencana yang membantu individu sekaligus berupaya memperbaiki sistem dan lingkungan yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Advokasi kebijakan merupakan bagian penting dari cara pekerja sosial menangani situasi pasca bencana. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial memainkan peran penting dalam memastikan kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat yang terdampak bencana didengar oleh pihak yang bertanggung jawab membuat kebijakan. Dengan melakukan advokasi, pekerja sosial membantu mendorong sistem dukungan sosial yang lebih baik, rencana penanggulangan bencana yang lebih inklusif, dan sumber daya yang adil bagi mereka yang paling berisiko. Pendekatan ini membantu pemulihan segera dan juga membawa perubahan jangka panjang yang membangun komunitas yang lebih kuat dan siap, terutama di Aceh, sehingga mereka dapat lebih baik menghadapi bencana di masa mendatang.

Tantangan Implementasi Penanganan Banjir Bandang

Upaya penanganan banjir bandang di Aceh masih menghadapi beberapa masalah terkait pengorganisasian dan pengelolaan, yang memengaruhi seberapa baik masyarakat pulih. Masalah besar adalah berbagai kelompok yang bekerja dalam penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional maupun lokal, tidak bekerja sama dengan baik. Banyak organisasi, termasuk pemerintah, kelompok bantuan, kelompok lokal, dan masyarakat itu sendiri, terlibat, tetapi tidak ada cara yang jelas bagi mereka untuk berkoordinasi. Hal ini menyebabkan duplikasi upaya, bantuan tidak diberikan di tempat yang paling membutuhkan, dan keterlambatan dalam membantu orang-orang yang terdampak. Masalah-masalah ini memperlambat proses keseluruhan dalam membantu masyarakat untuk bangkit kembali.

Selain itu, pengelolaan banjir bandang sebagian besar masih dijalankan dengan metode top-down, di mana rencana dan program pemulihan terutama diputuskan oleh pemerintah atau kelompok luar tanpa banyak masukan dari masyarakat yang benar-benar terdampak. Studi ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, tindakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan nyata atau situasi budaya dan sosial di daerah tersebut. Cara ini menempatkan masyarakat dalam peran pasif, menerima bantuan alih-alih aktif dalam pemulihan. Akibatnya, pengetahuan,

pengalaman, dan koneksi mereka di dalam komunitas tidak digunakan dengan tepat dalam menangani situasi bencana.

Terlalu memfokuskan perhatian pada penanganan keadaan darurat segera setelah bencana dapat mempersulit pemulihan jangka panjang di Aceh. Meskipun memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara sangat penting pada saat itu juga, studi menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan untuk membantu masyarakat membangun kembali kehidupan sosial mereka masih kurang. Rencana untuk membantu memperbaiki ekonomi, memulihkan lapangan kerja, dan membangun komunitas yang lebih kuat seringkali tidak dipikirkan dengan matang atau didukung dalam jangka panjang. Karena itu, banyak keluarga yang terdampak masih berjuang secara finansial dan bergantung pada bantuan untuk waktu yang lama.

Selain itu, kegagalan memprioritaskan pemulihan sosial juga terlihat dari lemahnya upaya membangun institusi lokal setelah bencana. Organisasi seperti kelompok masyarakat, pemimpin tradisional, dan kelompok keagamaan dapat memainkan peran besar dalam membantu masyarakat pulih, tetapi mereka jarang dilibatkan dalam rencana penanggulangan bencana. Studi ini menunjukkan bahwa jika institusi lokal ini tidak diperkuat, pemulihan seringkali berumur pendek dan tidak bertahan lama, karena tidak memiliki dukungan masyarakat yang kuat.

Situasi penanggulangan banjir bandang di Aceh menunjukkan perlunya perubahan dari pendekatan reaksi cepat dan jangka pendek menuju rencana yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk membangun kembali masyarakat. Masalah seperti kurangnya kerja sama tim, terlalu banyak kontrol dari atas, dan fokus hanya pada keadaan darurat dapat menghambat pemulihan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar yang menyatukan berbagai bidang, melibatkan masyarakat, memperkuat organisasi lokal, dan membantu membangun kembali ekonomi dan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat Aceh dapat memulihkan kualitas hidup mereka secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banjir bandang di Aceh merupakan persoalan kesejahteraan sosial yang kompleks dan multidimensional, bukan sekadar peristiwa alam yang berdampak fisik semata. Banjir bandang telah memicu kerentanan sosial yang luas, mulai dari hilangnya mata pencaharian, terganggunya fungsi sosial keluarga, meningkatnya risiko kemiskinan, hingga memburuknya kondisi psikososial masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penanganan bencana yang masih dominan berfokus pada respons darurat, bersifat top-down, serta lemah dalam koordinasi antarinstansi, berpotensi menghambat proses pemulihan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan di Aceh.

Dalam konteks tersebut, perspektif Islam kontemporer dan pendekatan pekerjaan sosial menawarkan kerangka konseptual dan praktis yang saling melengkapi. Nilai-nilai Islam seperti *ukhuwwah*, *ta'āwun*, dan *'adl* menegaskan pentingnya tanggung jawab kolektif, solidaritas sosial, serta keadilan dalam melindungi kelompok mustadh'afin sepanjang tahapan penanggulangan bencana. Sementara itu, pendekatan pekerjaan sosial menekankan intervensi berbasis komunitas, penguatan resiliensi sosial, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada pemulihan jangka panjang. Integrasi kedua perspektif ini menunjukkan bahwa penanganan banjir bandang yang efektif di Aceh harus melampaui bantuan darurat, dengan memprioritaskan rehabilitasi sosial-ekonomi, penguatan kelembagaan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, inklusif, dan berbasis nilai lokal-keagamaan, upaya penanggulangan bencana di Aceh diharapkan mampu mendorong pemulihan kesejahteraan sosial yang lebih adil, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, Syaufi Nazmi, S., Shofiatun, S., & Zamzam N. K. (2024). Persepsi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Lhoksukon: Studi Tinjauan Literatur**.** *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 3(2).

Fatimahsyam, F. (2024). Inklusi Sosial dan Keberagaman di Desa Tangguh Bencana: Studi Kasus Gampong Jawa, Banda Aceh**.** *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 5(2), 246–265.

Ismail, Nazli dkk. (2020). Mitigasi dan Adaptasi Struktural Bahaya Banjir Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Singkil Provinsi Aceh. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(2), 276–285.

Kasim, F. M., Nurdin, A., & Rizwan, M. (2021). Agama, Modal Sosial dan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Kota Banda Aceh. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), 66–73.

Lubis, H., Yusnaini, Y., Lestari, F., & Hayati, S. M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bakti Sosial Peduli Lingkungan pada Korban Banjir di Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 4(3), 164–169.

Maulita, R., Parahita, B. N., & Trinugraha, Y. H. (2023). Mitigasi Bencana Banjir Rob di Mangkang Wetan: Tindakan Sosial Masyarakat dan Kapabilitas Struktural. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 4(2), 178–200.

Sarifah, Fitriana dkk. (2024). Analisis Dampak Bencana Banjir terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi pada Masyarakat. BANDAR: *Journal of Civil Engineering*, 6(2).

Suwarno & Niam, M. (2024). Pekerjaan Sosial dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi (Studi Deskriptif Banjir Bandang). *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 5(1), 39–53.

Widayanti, Sri Yuni Murti (2018). Social Attitude and Community Participation on Flood Prevention Natural Disaster. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 15(2), 145–164.

Yunanda, Rizki. (2025). Power Relations in Flood Disaster Mitigation Policy in Aceh Utara. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 11(2), 288–298.